

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa

Kareena Priangka Putri¹, Choiruddin Choiruddin², Okky Savira³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

kareenapriangkaputri@gmail.com, choiruddin@polsri.ac.id,

okky.savira@polsri.ac.id

ABSTRACT

This purpose of this study to determine how capital expenditure in the 16 provinces located in Sumatera and java from 2019 to 2023 is influenced by locally generated revenue, special allocation funds, and the remaining budget surplus. The sampling technique used in this research is saturated sampling. This research utilizes secondary data and hypothesis testing tools using the statistical Product and Service Solutions (SPSS) software versions 26, with the data analysis method employed being multiple linier regression. The partial hypothesis test results show that regional original revenue and budget surplus have a positive and significant effect on capital expenditure. In contrast, special allocation funds have a negative and significant effect on capital expenditure. Simultaneously, the results indicate that regional original revenue, special allocation funds, and budget surplus, collectively have a positive and significant influence on capital expenditure.

Keywords: *Regional Original Revenue, Special Allocation Funds, Budget Surplus, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa yang terdiri dari 16 Provinsi pada tahun 2019 sampai 2023 dipengaruhi pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran. Teknik pemilihan sampel yang ada pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat uji hipotesis data yang menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dengan versi 26, dengan metode analisis data yang menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

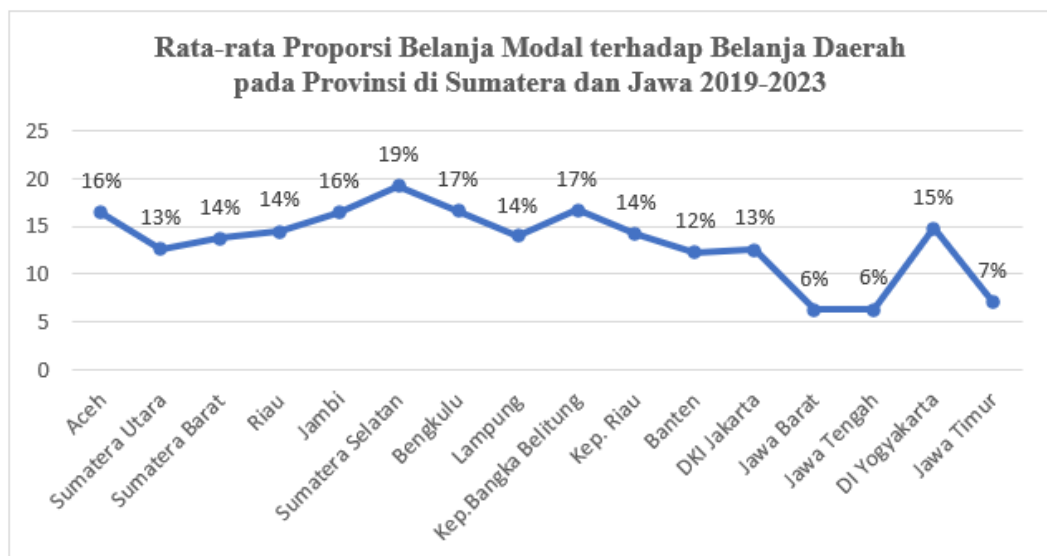
PENDAHULUAN

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 6 Tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola sendiri pemerintah serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menggali lebih potensinya guna membiayai keperluan belanja daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 17, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu tantangan yang ada dalam pemerintah daerah adalah berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk program kegiatan sumber daya yang tersedia cukup terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mampu mengatur pendapatan suatu daerah yang didapat untuk belanja-belanja yang bersifat produktif. Belanja Daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum (Abbas et al., 2021).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung, dimana belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Berdasarkan PMK NO.62 Tahun 2023, Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Daerah wajib mengalokasikan minimal 40% dari total belanja untuk belanja modal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022. Namun, faktanya masih ada daerah yang masih perlu mencapai besaran target belanja modal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti yang terlihat pada Provinsi di Sumatera dan Jawa.



Gambar 1. Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sumber: e-ppid.bpk.go.id (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan data gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa selama periode 2019-2023 masih rendah dan belum optimal, persentasenya masih dibawah 40% Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah masih belum memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum. Dalam hal ini, Belanja modal menjadi hal yang sangat penting karena infrastruktur serta sarana prasarana yang meningkat akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285, sumber pendanaan pemerintah daerah berasal dari pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan kemandirian fiskal daerah karena diperoleh dari potensi lokal yang terdapat pada setiap daerah. Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah bergantung pada kapasitas masing-masing daerah dalam mengelola sumber dayanya. Semakin besar potensi sumber daya yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat kemandirian dan kapasitas keuangan antar daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal. Sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan kapasitas keuangan antar daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah, serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bagian dari dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat adalah dana alokasi khusus (DAK). Menurut (Wisnuwardana & Kurnia, 2023), Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah serta selaras dengan prioritas nasional. Dana ini dimanfaatkan terutama untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dasar yang belum memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Selain mengandalkan PAD dan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai sumber pembiayaan. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode anggaran (Siregar, 2017). Dana SILPA umumnya dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, terutama belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur serta pengadaan aset publik. SILPA juga mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena terbentuk dari adanya surplus APBD dan pembiayaan *netto* yang positif, dimana penerimaan pembiayaan melebihi pengeluarannya (Afkarina & Hermanto, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan (Al Habib Ahmad Nasution et al., 2022) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan (Maula et al., 2023)

yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Hasil dari (Al Habib Ahmad Nasution et al., 2022) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari (Maula et al., 2023) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif, sedangkan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal.

Dengan hasil temuan yang berbeda-beda pada setiap variabel dan uraian latar belakang permasalahan di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa. Penulisan ini diberi judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi di Sumatera dan Jawa”

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini didasarkan pada teori Keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara prinsipal dan agen digambarkan sebagai suatu bentuk kontrak, dimana satu pihak atau lebih (prinsipal) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen). Dalam penelitian ini, teori keagenan tercermin dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dengan melimpahkan kewenangan kepada pihak pemerintah daerah, yang berperan sebagai agen untuk mengelola urusan pemerintahan termasuk dibidang keuangan daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan fiskal kepada daerah melalui Dana Alokasi Khusus yang berasal dari APBN ditujukan untuk membantu daerah dalam menjalankan fungsinya dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Teori keagenan dapat pula dilihat dalam hubungan antara masyarakat sebagai pihak prinsipal yang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, retribusi, serta kontribusi lainnya yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah, sebagai agen pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pendapatan tersebut sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas layanan publik dan sarana umum bagi masyarakat. Selain itu teori keagenan dapat dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh dari selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode, dimana pemerintah pusat dan masyarakat sebagai pihak prinsipal yang melimpahkan kepercayaan pada pemerintah daerah berperan sebagai pihak agen yang bertugas mengelola dana tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen dalam membiayai kebutuhan belanja daerah serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya tanpa ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketersediaan

infrastruktur serta fasilitas yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan mendorong ketertarikan investor untuk berinvestasi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Badjra et al., 2017) menunjukkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut (Wisnuwardana & Kurnia, 2023), Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah serta selaras dengan prioritas nasional. Dana ini dimanfaatkan terutama untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dasar yang belum memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Tujuan utama pemberian dana alokasi khusus adalah untuk mengurangi ketidakmerataan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah itu sendiri. Jadi semakin tinggi alokasi Dana Alokasi Khusus yang diperoleh daerah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan belanja modal. Hasil temuan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Ananda & Habiburrahman, 2023) menunjukkan hasil Dana Alokasi Khusus memberikan dampak positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Menurut (Siregar, 2017), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta antara penerima dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode fiskal. SILPA bisa dimanfaatkan kembali dalam bentuk belanja modal untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan SILPA sering dijadikan sebagai indikator efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena terbentuknya SILPA menunjukkan adanya kelebihan anggaran dalam APBD serta kondisi pembiayaan neto yang positif yaitu Ketika penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya (Afkarina & Hermanto, 2017). Hasil temuan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Pika et al., 2021) menunjukkan hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memberikan dampak positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Objek Penelitian terletak pada 16 (enam belas) Provinsi di Sumatera dan Jawa dari tahun pengamatan 2019 sampai tahun 2023. Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019-2023 melalui *website* <https://e-ppid.bpk.go.id>. Variabel independen merupakan variabel yang berperan sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Sementara itu, variabel dependen

atau yang variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2022:39). Penelitian Ini melibatkan tiga variabel independen yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta satu variabel dependen yaitu Belanja Modal. Teknik sampel yang dipakai pada peneliti ini menggunakan sampling jenuh. Data yang dianalisis menggunakan *software* SPSS versi 26.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Pendapatan Asli Daerah (X1)	PAD = Pajak Daerah +Retribusi Daerah +Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(UU No 1 tahun 2022).
Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus = (Penerimaan Umum APBD - Belanja Pegawai PNSD)	(PP Nomor 55 Tahun 2005)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)	Sisa Lebih Perhitungan anggaran = Surplus/Defisit + Pembiayaan <i>Netto</i>	(Siregar, 2017).
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan +Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya + Belanja BLU	(PMK Nomor 62 Tahun 2023).

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ringkasan atau gambaran umum terhadap data yang telah dikumpulkan, yang ditampilkan melalui ukuran seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan *standar deviation*.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	80	27.25	31.53	29.1248	1.13719
Dana Alokasi Khusus	80	25.64	30.02	28.0944	.96984
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	80	24.09	29.91	27.1918	1.28718
Belanja Modal	80	26.51	30.08	27.8475	.73951
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data *output* IBM SPSS 26 diolah, 2025

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33102052
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.066
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data *output*

IBM SPSS 26 diolah, 2025

Hasil *output* uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang ditampilkan pada gambar di atas, memperlihatkan bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 80 dan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Dengan demikian, residual model regresi terdistribusi normal dan terpenuhi salah satu dari asumsi klasik yang diperlukan.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.381	1.114		11.116	.000		
Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000	.243	4.121
Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013	.323	3.099
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000	.472	2.120

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data *output* IBM SPSS 26 diolah, 2025

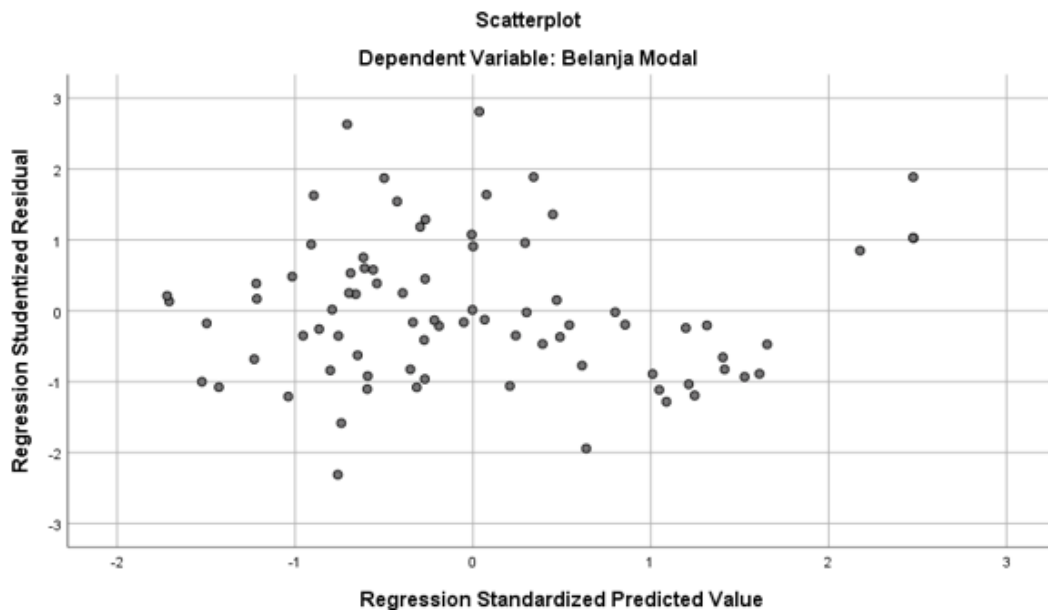
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas ini, seluruh variable independent menunjukkan nilai tolerance diatas 0,10 serta nilai VIF lebih dibawah 10. Hal ini menunjukkan model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas dan dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.792	.33749	1.906
a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Sumber: Data *output* IBM SPSS 26 diolah, 2025

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson, diperoleh nilai *Durbin Watson* (d) sebesar 1,906. Syarat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jika tidak terjadi autokorelasi pada suatu penelitian ialah $DU < DW < 4-DU$, sehingga jika diterapkan dalam penelitian ini menghasilkan nilai $1.7153 < 1.906 < 2.2847$. Berdasarkan nilai tersebut, artinya model regresi memenuhi asumsi bebas autokorelasi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data *output* IBM SPSS 26 diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* diatas menunjukan bahwa tidak ada pola yang teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.381	1.114		11.116	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data *output* IBM SPSS 26 diolah, 2025

1. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 12,381 yang artinya menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai 0 maka belanja modal akan bernilai 12,381.
2. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif sebesar 0,515. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,515 atau 51,5% dengan catatan variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai negatif sebesar -0,175. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan pada belanja modal sebesar 0,175 atau 17,5% dengan catatan variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan nilai positif sebesar 0,198. Artinya bahwa setiap peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 1% maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,198 atau 19,8% dengan catatan variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.894 ^a	.800	.792	.33749

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil *output* uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,792 atau sebesar 79,2%. Hal ini berarti bahwa 79,2% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 79,2%) atau 20,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Tabel 8. Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.381	1.114			
	Pendapatan Asli Daerah	.515	.068	.792	7.600	.000
	Dana Alokasi Khusus	-.175	.069	-.230	-2.540	.013
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	.198	.043	.344	4.607	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki t_{hitung} sebesar 7,600. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($7,600 > 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki t_{hitung} sebesar -2,540. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($-2,540 < 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,013 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara langsung Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 4,607. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,9916 atau ($4,607 > 1,9916$). Kemudian, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara langsung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Tabel 9. Uji Statistik f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.547	3	11.516	101.104	.000 ^b
	Residual	8.656	76	.114		
	Total	43.203	79			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah						

Hasil dari tabel 9 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 101,104 dengan tingkat signifikansi 0,000, maka dapat dikatakan bahwa F_{hitung} sebesar 101,104 > F_{tabel} sebesar 2,72 (101,104 > 2,72), sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa. Arah hubungan yang terbentuk positif menunjukkan Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya tanpa ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat.
2. Dana alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa. Arah hubungan yang terbentuk negatif menunjukkan Dana Alokasi Khusus berbanding terbalik dengan nilai belanja modal dalam artian jika Dana Alokasi Khusus meningkat, maka nilai belanja modal menurun begitu pun sebaliknya.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa. Arah hubungan yang terbentuk positif menunjukkan ketika SILPA bernilai positif, pemerintah daerah mendapatkan dana tambahan yang dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk belanja modal atau investasi jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa.

Saran

1. Untuk mendorong peningkatan belanja modal, pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa sebaiknya menggali potensi provinsi masing-masing yang ada pada daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat.
2. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran diharapkan pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa menggunakannya sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan belanja modal.
3. Kebijakan yang akan dilakukan Provinsi di Sumatera dan Jawa terhadap pelaksanaan belanja modal mencerminkan bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan dan pembangunan kepada masyarakat dapat tercermin melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus, sehingga realisasi penerimaan dari dua bidang tersebut perlu terus ditingkatkan dan didorong untuk kesejahteraan masyarakat yang luas pada suatu daerah
4. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran diharapkan pemerintah Provinsi di Sumatera dan Jawa menggunakannya sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021*, 24, 687–692.
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–18.
- Al Habib Ahmad Nasution, S., Zainal Arifin, K., & Choiruddin, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1637–1656.
- Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7437–7448.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior,

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 10 (2025) 3523 – 3535 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.9150

agency costs, and ownership structure. *Jurnal of Financial Economics*, 3(4), 1–78.

Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang *Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.

Maula, K. A., Alfiah, K. N., Mubarokah, I., Adawiyah, W. R., & Setyorini, C. T. (2023). Factors Affecting Capital Expenditure In Districts in West Java Province. *Accounting Analysis Journal*, 12(2), 134–143.

Pika, Saiful, & Aprila, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness*, 8(2), 125–140.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.

Wisnuwardana, G. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilimu Dan Riset Akuntansi*, 12(10), 1–18.